

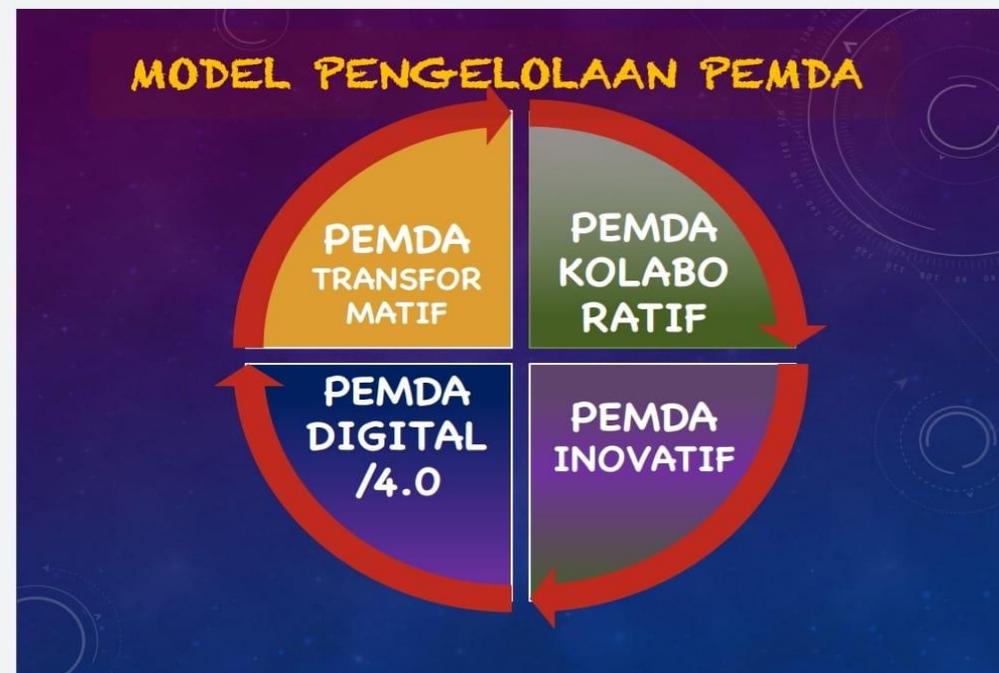
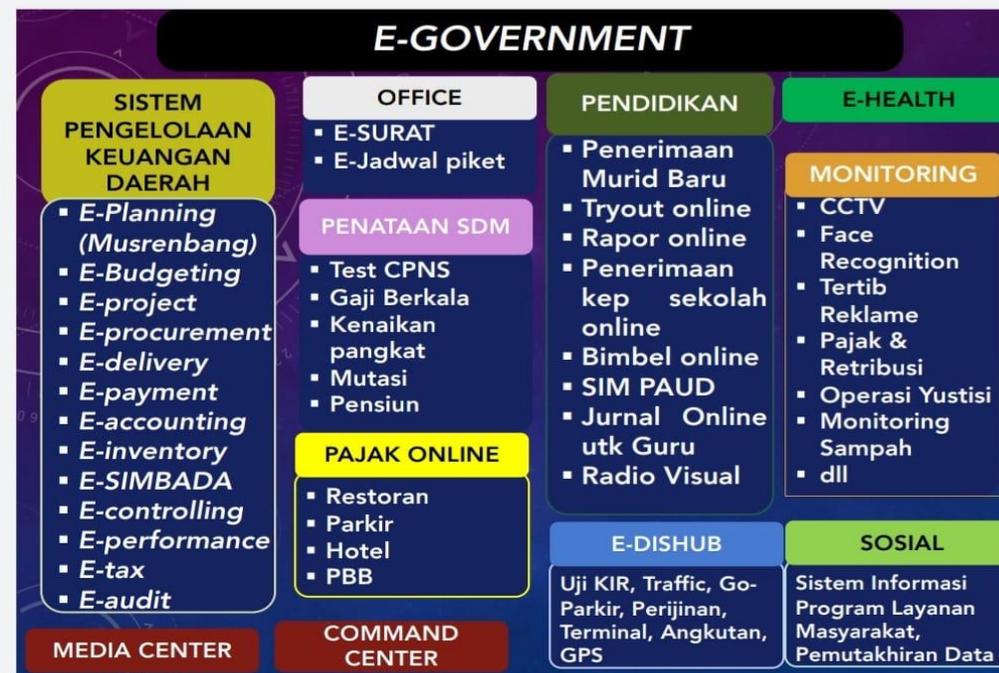
MEMBAHAS EVALUASI KELEMBAGAAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**PENYEDERHANAAN  
BIROKRASI**

MOHAMMAD TAUFIK

Samarinda, 23 SEPTEMBER 2021

## ISU – ISU OTONOMI DAERAH 20 TAHUN REFORMASI :

1. TARIK MENARIK KEWENANGAN, TUMPANG TINDIH KEWENANGAN.
2. **KELEMBAGAAN YANG GEMUK.**
3. POLITISASI BIROKRASI
4. PENGELOLAAN APBD DAN PAD YANG RENDAH
5. PERDA BERMASALAH
6. MASALAH PILKADA (POLITIK DINASTI, PECAH KONGSI, CALON TUNGGAL, dll)
7. KEMITRAAN KDH DENGAN DPRD
8. LEMAHNYA PENGAWASAN
9. **PELAYANAN PUBLIK DAN DIGITALISASI (4.0)**



# ARAHAN PRESIDEN RI

- 1 **PEMBANGUNAN SDM**
- 2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- 3 SIMPLIFIKASI REGULASI
- 4 **PENYEDERHAN AAN**
- 5 TRANSFORMASI EKONOMI



# 5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024



## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- penghubung produksi dan distribusi
- mempermudah akses wisata
- mendongkrak lapangan kerja
- nilai tambah perekonomian

## SIMPLIFIKASI REGULASI

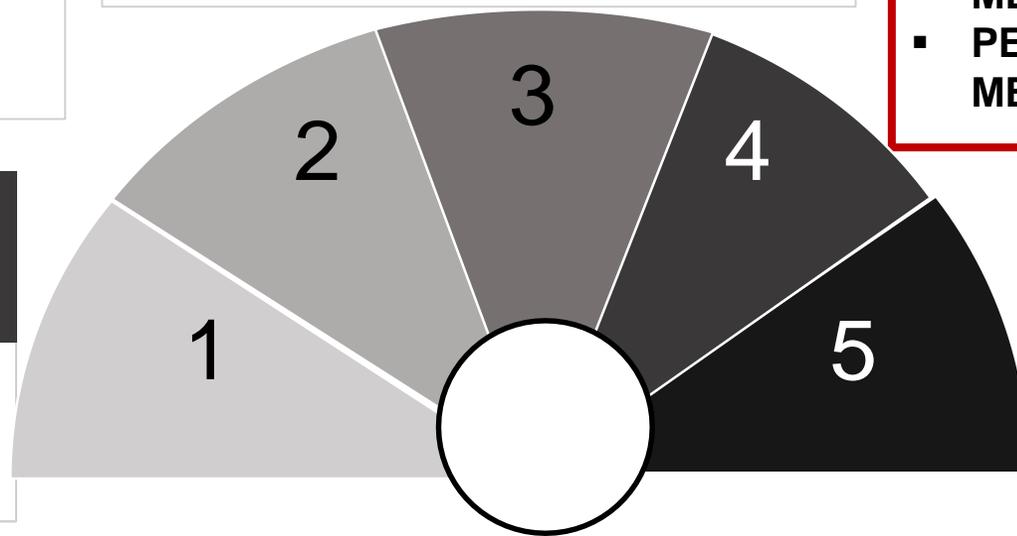
- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

## PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- **PENYEDERHANAAN BIROKRASI MENJADI 2 LEVEL ESELON**
- **PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI FUNGSIONAL**

## PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global



## TRANSFORMASI EKONOMI

Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



# KOMPOSISI JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI PEMERINTAH

**PNS INDONESIA**

Per 30 Juni 2019

**4.286.918**



Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon V

**Jabatan Struktural  
11% dari PNS Nasional**

**101.826**

**333.405**

**15.037**

**JUMLAH PNS  
INSTANSI**

Pusat	17.538
Daerah	84.288
Pusat	61.952
Daerah	271.453
Pusat	12.769
Daerah	2.268

# RUANG LINGKUP PENYEDERHANAAN BIROKRASI



PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Birokrasi yang lebih dinamis, *agile*, dan profesional guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik

## INSTANSI PUSAT

KEMENTERIAN

SEKRETARIAT  
LEMBAGA NEGARA

SEKRETARIAT  
LEMBAGA NON  
STRUKTURAL

LEMBAGA  
PEMERINTAH NON  
KEMENTERIAN

LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK

## INSTANSI DAERAH

PEMERINTAH  
PROVINSI

PEMERINTAH  
KABUPATEN/ KOTA



# KRITERIA PENYEDERHANAAN BIROKRASI

1

## KRITERIA PENGECUALIAN:

1. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau
2. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; atau
3. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing K/L kepada Menteri PANRB

**TETAP PADA JABATAN  
ADMINISTRASI**

2

## KRITERIA YANG DIALIHKAN:

Tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional dan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional serta berbasis keahlian/keterampilan tertentu

**DIALIHKAN KE  
JABATAN FUNSIONAL**

**ESELON 3  
(Administrator)**

**Fungsional  
AHLI MADYA**

**ESELON 4  
(Pengawas)**

**Fungsional  
AHLI MUDA**

**ESELON 5  
(Pelaksana)**

**Fungsional  
AHLI PERTAMA**

# TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI



## FASE PRAGMATIS

1

IDENTIFIKASI JABATAN  
ADMINISTRASI PADA UNIT  
KERJA

2

PEMETAAN JABATAN DAN  
PEJABAT ADMINISTRASI

3

PEMETAAN JABATAN  
FUNGSIONAL YANG DAPAT  
DIDUDUKI

4

PENYELARASAN  
TUNJANGAN JABATAN

5

PENYELARASAN  
KELAS JABATAN

# MEKANISME PENGALIHAN JABATAN

## TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI



**1** IDENTIFIKASI JABATAN ADMINISTRASI PADA UNIT KERJA

**2** PEMETAAN JABATAN DAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK

**3** PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIDUDUKI PEJABAT YANG TERDAMPAK

**4** PENYELARASAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DENGAN TUNJANGAN JABATAN ADMINISTRASI

**5** PENYELARASAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DENGAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI



PEMBAHASAN :

**KAJIAN EVALUASI KELEMBAGAAN  
PEMKOT SAMARINDA 2021**

## Hasil kajian memberikan :

1. Perlunya rasionalisasi (downsizing) struktur kelembagaan melalui **penggabungan (merger)** dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah dengan fungsi sejenis, dan kriteria lain yang relevan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota, dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah saat ini adalah mencari **struktur dan fungsi yang proporsional**, bukan sekedar miskin struktur saja, namun mencoba mendesain Organisasi Perangkat Daerah secara benar (rightsizing).
2. Artinya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang jelas secara nomenklatur, jelas batas kewenangannya, jelas pelaksanaan urusannya, jelas target kinerjanya, dan dapat mewujudkan **visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 : “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**.

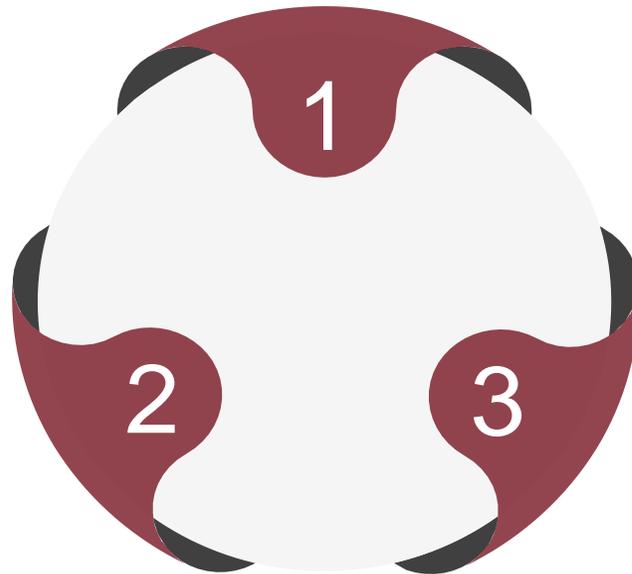
## **BERDASARKAN HASIL KAJIAN PUSLABANG KDOD – LAN 2021 :**

- 1) Di rekomendasikan 19 Dinas, 5 Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Kecamatan (terdiri dari 10 Kecamatan).
- 2) Pengurangan jumlah perangkat daerah sebanyak :
  - a) 8 Dinas dari sebelumnya berjumlah 27 Dinas;
  - b) Badan berkurang 2 dari sebelumnya 7 Badan

Catatan : landasan PP No. 18 Tahun 2016 yang kemudian disesuaikan dengan UU 23/ 2014, kebijakan sektoral, dan Kepmendagri 050-3708/2020

**PILOT PROJECT** PENGALIHAN JABATAN ADMINISTRATOR & PENGAWAS  
IDENTIFIKASI UNIT KERJA, TUGAS DAN FUNGSI YANG TIDAK DAPAT DIALIHKAN  
(SE MENTERI PANRB NO. 384 TAHUN 2019)

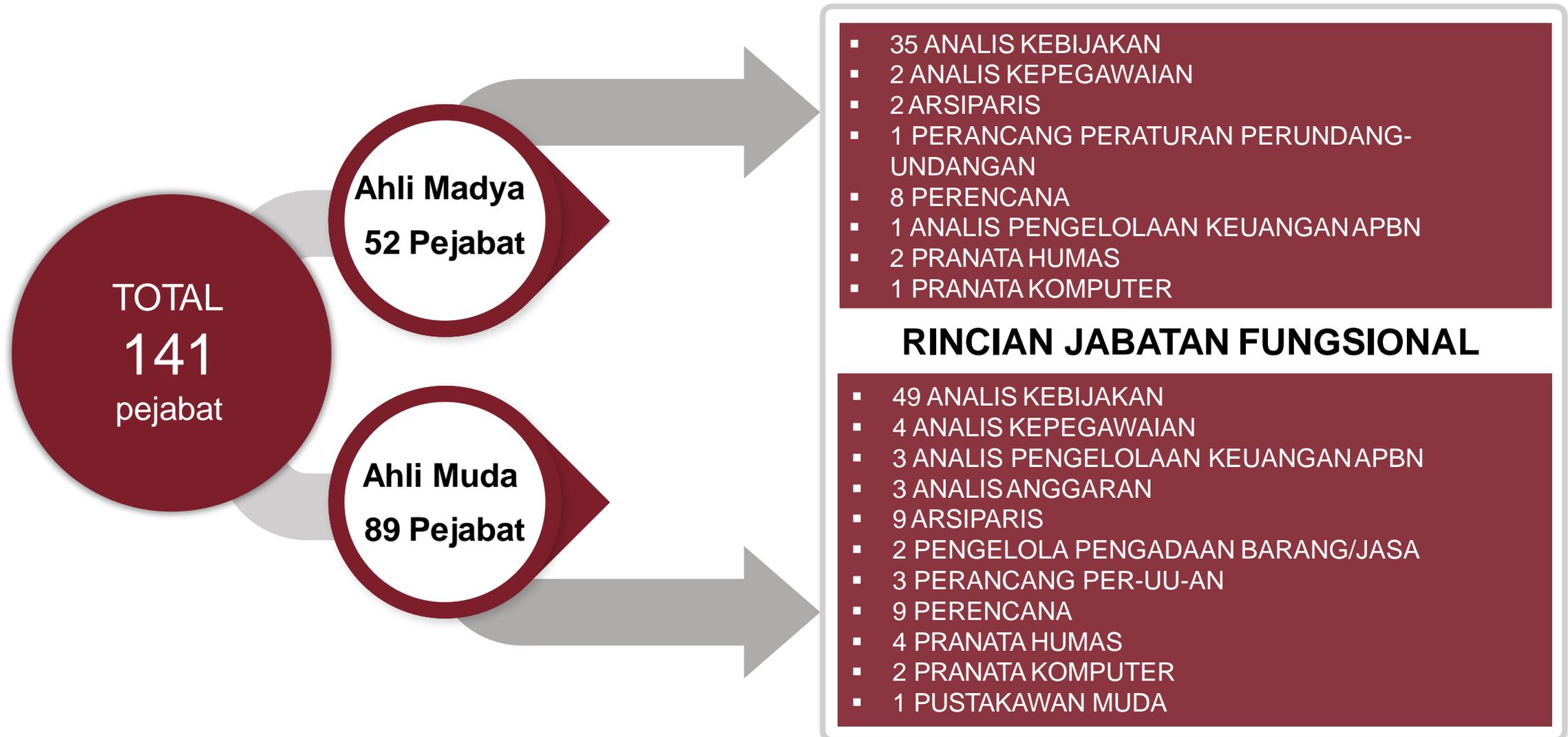
**Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa**



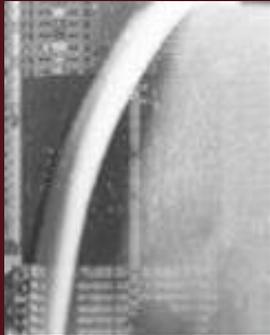
**Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan**

- Kriteria dan syarat lain usulan K/L:**
- 1. Amanat Perpres 16/2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Strategi Nasional PK:**
    - Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - 2. Sebagian besar tugas dan fungsi tidak dapat diakomodasi dalam uraian tugas jabatan fungsional:**
    - Keprotokolan
    - Kerumahtanggaan

# **PILOT PROJECT** PENGALIHAN JABATAN ADMINISTRATOR & PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN PANRB



# TERIMA KASIH



## DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.